



## **Gangguan DI/TII di Perbatasan Enrekang-Toraja Pada Pemilu 1955**

Abd. Rahman<sup>1\*</sup>, Abdurakhman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia; [abd.rahman11@alumni.ui.ac.id](mailto:abd.rahman11@alumni.ui.ac.id)

<sup>2</sup> Departemen Sejarah Universitas Indonesia; [abdurakhman.hum@ui.ac.id](mailto:abdurakhman.hum@ui.ac.id)

\*Korespondensi

Dikirim: 04-11-2022; Direvisi: 16-04-2023; Diterima: 24-05-2023; Diterbitkan: 30-06-2023

**Abstrak:** The 1955 elections were the first elections held by the Indonesian government, but the vast territory of Indonesia did not make the 1955 elections a completely safe election because there were still many upheavals in the regions that occurred. One of the upheavals that occurred was the DI / TII movement that occurred in several places in Indonesia, one of which was the South Sulawesi region. The movement led by Qahar Mudzakkar disrupted the 1955 elections both during the implementation and in preparation for this election. Especially for areas on the Enrekang-Toraja border. Therefore, this article analyzes how DI/TII interference in the border area is an attempt to thwart the election. This research uses historical research methods which include heuristics, criticism, interpretation, and historiography by analyzing the Enrekang Archives Inventory, Toraja, Sulawesi Province. The results showed that areas that were not controlled by DI/TII were still able to carry out elections, but DI/TII areas located on the border could not carry out elections which were marked by the absence of election equipment in the area. However, DI/TII areas close to the city conducted elections secretly so that several regions had time to carry out elections in different ways in anticipation of the conditions at that time.

**Keywords:** DI/TII; election; Enrekang

**Abstrak:** Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia namun wilayah Indonesia yang begitu luas tidak menjadikan pemilu 1955 menjadi pemilu yang sepenuhnya aman karena masih banyaknya pergolakan di daerah-daerah yang terjadi. Salah satu pergolakan yang terjadi ialah adanya gerakan DI/TII yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya ialah wilayah Sulawesi Selatan. Gerakan yang dipimpin oleh Qahar Mudzakkar ini melakukan gangguan terhadap pemilu 1955 baik pada saat pelaksanaan maupun dalam rangka persiapan pemilu ini. Terutama untuk daerah-daerah yang berada di perbatasan Enrekang-Toraja. Oleh karena itu, artikel ini menganalisa bagaimana gangguan yang dilakukan DI/TII di daerah perbatasan sebagai upaya untuk menggagalkan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi dengan menganalisis inventaris arsip Enrekang, Toraja, Provinsi Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang tidak dikuasai oleh DI/TII masih dapat melaksanakan pemilu namun daerah DI/TII yang berada diperbatasan tidak dapat melaksanakan pemilu yang ditandai dengan tidak terbentuknya perlengkapan pemilu di daerah tersebut. Akan tetapi daerah DI/TII yang dekat dengan kota melakukan pemilu secara sembunyi-sembunyi sehingga beberapa daerah sempat melaksanakan pemilu dengan cara yang berbeda dalam mensiasati kondisi saat itu.

**Kata Kunci:** DI/TII; Enrekang; pemilu



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Setelah memperoleh kemerdekaan di tahun 1945, perjalanan terjal untuk memperoleh keamanan di dalam negeri sendiri justru baru dimulai. Bangsa ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan dalam negeri. Pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi menyusul kembalinya Belanda yang melancarkan agresi militernya. Salah satu perlawanan dalam negeri yang terjadi adalah gerakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) yang diproklamlirkan oleh S. M. Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampang, Jawa Barat (Dijk, 1993)

DI/TII yang awalnya terbentuk di tahun 1949 berdiri karena ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap keputusan Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia karena wilayahnya yang semakin sempit. Gerakan DI/TII ini kemudian meluas hingga ke beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Selatan. Daerah terakhir yang disebut merupakan lokasi pemberontakan DI/TII terlama karena baru berakhir di tahun 1965. DI/TII menjadi salah satu pergolakan dalam negeri yang harus diselesaikan Indonesia yang telah kembali ke Konsep Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 setelah adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949 (Irdaniah, 2022)

Setelah kembali ke Negara Kesatuan pada 1950, Indonesia tetap menggunakan sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal dari tahun 1950-1959. Pada periode ini terjadilah beberapa kali pergantian kabinet yang terjadi hampir setiap tahunnya. Terdapat tujuh kabinet yang silih berganti menjadi perdana menteri pada demokrasi parlementer ini diantaranya: Kabinet Natsir (September 1950- Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastoadmidjojo I (Juli 1953-Agustus 1955), Ali Sastoadmidjojo II (Maret 1956-Maret 1957), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956) serta Kabinet Djuanda pada periode April 1957-Juli 1959 (Irdaniah, 2022). Meskipun kabinet ini silih berganti namun ada satu kesamaan yang berusaha diwujudkan oleh masing-masing kabinet yaitu melaksanakan pemilu pertama. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian sebab pemilu pertama baru dapat berlangsung tahun 1955. Pada era Kabinet Natsir rancangan pelaksanaan pemilu telah dibahas namun itu semua baru sampai pada tahap perencanaan. Sementara itu pada masa Kabinet Wilopo rancangan Undang-Undang pemilu telah diajukan dan disahkan pada 3 April 1953. Namun, meskipun telah disahkan pemilihan umum yang pertama baru benar-benar dapat terlaksana pada era Kabinet Burhanudin Harahap (Ricklefs, 2005).

Ketika akhirnya dapat dilihat pada tahun 1955, secara umum pemilu berlangsung aman dan lancar dengan menghadirkan PNI sebagai pemenang pemilu ini dengan perolehan suara mencapai 22,3% (Ricklefs, 2005). Meskipun begitu pemilu ini sebenarnya terlaksana ketika beberapa daerah di Indonesia masih mengalami pergolakan terutama akibat adanya gerakan

DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Selatan. DI/TII melakukan pengacauan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilu 1955 terutama di Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mengalami pergolakan DI/TII terlama dari daerah-daerah lainnya (Maulida Hilmy Faihsal, 2018).

Pemilihan umum di Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya gagal. Beberapa daerah dan kota masih ada yang berhasil melaksanakan pemilu seperti Palopo, Makassar dan beberapa wilayah *Afdeling* Pare-Pare, sementara wilayah lainnya ada yang terpaksa harus menunda pemilu karena adanya gangguan dari DI/TII namun penundaannya tidaklah berlangsung lama sebab pemilunya masih dapat dilangsungkan di tahun yang sama.

Masalah yang sesungguhnya kemudian muncul pada wilayah Sulawesi Selatan yang berada di pedalaman sebab wilayah Sulawesi Selatan masih banyak yang masyarakatnya pada saat itu tinggal di pelosok terutama yang berada di dataran tinggi seperti daerah Toraja dan Enrekang. Wilayah Enrekang yang 85% daerahnya adalah pegunungan dimanfaatkan oleh DI/TII untuk bergerilya dan menghindari kejaran TNI. Hal tersebut berakibat pada adanya dua pengaruh di tempat ini yaitu daerah yang berada dibawah pengaruh TNI serta daerah yang berada dibawah pengaruh DI/TII. TNI menempati kota dan sepanjang jalan poros mendirikan pos-pos penjagaan, sementara DI/TII menguasai pedesaan di pegunungan (Abd. Rahman Narra, 2018). Beberapa pegunungan Enrekang sendiri merupakan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain seperti Luwu dan Tana Toraja.

Gangguan yang dilakukan oleh DI/TII terhadap Pemilu 1955 di Enrekang dan sekitarnya tidak hanya terjadi pada saat pemilu ini berlangsung melainkan juga dalam tahap persiapan pemilu. Hal ini membuat beberapa daerah di Enrekang dengan terpaksa tidak dapat melaksanakan pemilu yang dibuktikan dengan tidak adanya perlengkapan pemilu yang terbentuk di beberapa wilayah di Enrekang sebab banyak daerah di Enrekang yang telah berada dibawah kekuasaan DI/TII terutama daerah kawasan Duri Kompleks yakni daerah yang berbatasan dengan Toraja. Hal ini tidak hanya terjadi di Enrekang, salah satu tempat yang menjadi sasaran DI/TII adalah daerah perbatasan sebab melalui daerah perbatasan itu mereka dapat meluaskan wilayah kekuasaannya (Pendeta Daud Sangka, 2018). Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya beberapa daerah Toraja oleh DI/TII yang berbatasan dengan Enrekang. Itulah mengapa pada artikel ini tidak hanya membahas wilayah Enrekang tapi juga wilayah Toraja sebab dampaknya terasa hingga ke Toraja. Sehingga anggapan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang aman perlu ditinjau kembali sebab wilayah Indonesia yang cukup luas tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah yang luput dari kata aman pada saat pelaksanaan pesta demokrasi pertama ini.

Kurun waktu pada penelitian ini dibatasi dari tahun 1954 hingga 1955. Tahun 1954 dipilih sebagai titik awal kajian karena pada saat itulah Qahar mengeluarkan larangan bagi masyarakat agar tidak turut berpartisipasi pada pemilu. Mereka yang memberikan suara dalam pesta demokrasi ini akan dianggap kafir. Sementara tahun 1955 di pilih menjadi batas akhir penelitian ini karena tahun tersebut pemilu pertama berlangsung.

Kajian tentang DI/TII terkhusus di Sulawesi Selatan sudah beberapa kali dilakukan oleh Anhar Gonggong (1992), C. van Dijk (1993), Harvey (1989). Ketiganya merupakan buku yang menjadi pedoman utama ketika menulis DI/TII di Sulawesi Selatan. Pada dasarnya ketiga buku ini menguraikan bagaimana DI/TII di Sulawesi Selatan berkembang. Selain buku-buku tersebut sejumlah tulisan tentang DI/TII juga sudah ada seperti Tesis dari Rusmala Dewi Kabubu (2017) yang menulis DI/TII di Toraja. Namun karena membahas satu kabupaten maka pembahasannya hanya membahas tentang perkembangan DI/TII di Toraja. Sementara itu penulisan tentang pemilu juga telah ada seperti Tesis dari Hilmy (2018) di Universitas Indonesia yang membahas gejolak perpolitikan setelah pemilu 1955. Kemudian ada juga Tesis dari Irdaniah (2022) yang membahas pemilu 1955 di *Afdeling* Pare-Pare. Namun dari sekian banyaknya tulisan yang membahas DI/TII dan pemilu, belum ada tulisan yang mengerucutkan pembahasan pemilu dengan melihat gangguan yang dilakukan oleh DI/TII sebagai suatu gangguan yang dianggap cukup serius terutama di Sulawesi Selatan. Apalagi cukup banyak daerah di Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh DI/TII saat itu. Penelitian ini menjadi kajian yang mengerucutkan pembahasan DI/TII pada satu persoalan yakni pemilu. Terlebih lagi dalam beberapa tahun kedepan Indonesia akan kembali melakukan pemilu sehingga dianggap perlu untuk melihat kembali bagaimana gejolak-gejolak pemilu yang pernah terjadi di awal-awal terbentuknya Indonesia sebagai bahan evaluasi untuk menyikapi persoalan-persoalan politik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian tentang berbagai gangguan dan gejolak yang terjadi pada pemilu 1955 dengan fokus kajian pada gangguan yang dilakukan oleh DI/TII. Wilayah penelitian kemudian dipusatkan pada daerah perbatasan antara Enrekang dan Toraja sebab daerah tersebut dikuasai oleh DI/TII sehingga penggambaran daerah ini melalui arsip kurang, sebab tidak berada dibawah pengawasan negara. Melalui penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap pergolakan pemilu pertama pada daerah yang jarang disorot selama ini yakni pada daerah-daerah perbatasan di Sulawesi Selatan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada tahapan pertama yaitu heuristik, penulis mencari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal dan tidak lupa pula menggunakan arsip sebagai penunjang terutama arsip-arsip yang ada di Dinas Arsip Sulawesi Selatan. Buku-buku utama yang digunakan adalah buku tentang DI/TII di Sulawesi Selatan seperti buku Anhar Gonggong, Barbara Sillars Harvey dan C.van Dijk. Kemudian arsip-arsip yang banyak digunakan ialah arsip inventaris Enrekang, Provinsi Sulawesi serta Toraja. Arsip tersebut memberikan gambaran tentang kondisi wilayah mana saja di Enrekang dan Toraja yang mengalami gangguan oleh DI/TII selama pelaksanaan pemilu sehingga dapat dilakukan pemetaan wilayah yang dapat melaksanakan pemilu dan wilayah yang tidak dapat melaksanakan pemilu di Enrekang dan Toraja. Namun, penulis menyadari bahwa kajiannya ini secara sumber tertulis akan sulit didapatkan sebab daerah penelitiannya yang sempat berada dibawah pengaruh DI/TII sehingga pengarsipan pada daerah ini jarang dijumpai. Karena itu penulis melakukan wawancara di dua tempat yakni Enrekang dan Toraja. Terutama pada daerah

Toraja Barat yang berbatasan dengan Enrekang sebab wilayah ini dimanfaatkan oleh DI/TII menjadi lalu lintas pergerakan mereka ke Toraja. Penulis menjumpai beberapa narasumber seperti S. Minta yang pernah menjadi kepala kampung pada daerah Benteng Alla yang berbatasan langsung dengan Toraja. Penulis juga berhasil mewawancarai beberapa penduduk yang terlibat langsung dalam penyerangan yang dilakukan oleh DI/TII ke wilayah-wilayah Toraja guna menggagalkan pelaksanaan pemilu.

Kemudian tahap berikutnya yaitu kritik sumber, melalui kritik sumber penulis membandingkan data-data di arsip dengan wawancara yang penulis lakukan di lapangan. Data arsip memang tidak banyak membantu namun melalui arsip penulis mendapat gambaran pada daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh DI/TII dan bagaimana pemilu itu dipersiapkan di Enrekang. Melalui tahapan ini data yang diperoleh dicek untuk melihat apakah sudah valid dengan menghubungkannya dengan fakta sejarah sehingga isinya tidak dibuat-buat (Sulasman, 2014). Pada tahapan selanjutnya ialah Interpretasi, melalui tahapan ini penulis menyadari semua data yang didapatkan tidak harus di masukkan dalam tulisan ini, penulis memilih beberapa data yang dianggap penunjang tema dari tulisan ini yakni DI/TII dan pemilu, namun dari itu semua penulis banyak menggunakan sumber lisan sebab daerah ini pengarsipannya sangat kurang. Pada tahap terakhir yakni Historiografi penulis kemudian melakukan penyusunan secara sistematis pada data-data yang telah diolah sebelumnya untuk dapat memberikan artikel yang sistematis. Pembahasan mengenai gangguan DI/TII di perbatasan Enrekang-Toraja dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari persiapan menjelang pemilu 1955, terlaksananya pemilu 1955 hingga berbagai gejolak gangguan yang terjadi di perbatasan Enrekang-Toraja

## **Hasil Penelitian**

### **Menuju Pemilu 1955**

Indonesia yang diproklamlirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah negara demokrasi dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat yang kemudian dijalankan oleh pemerintah atas nama rakyat. Beberapa ciri dari negara demokrasi ialah adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil serta pers yang bebas. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi, salah satu caranya ialah melalui pemilu. Dalam pelaksanaannya kemudian, partai-partai politik akan berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dimana pihak partai politik yang memenangkan pemilu nantinya akan tampil sebagai pihak yang memerintah (ANRI, 2019).

Pemilu di Indonesia sejatinya telah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1946 namun urung terlaksana. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tertanggal 16 Oktober 1945, pemerintah berencana akan melaksanakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat (Irdaniah, 2022). Namun, tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Indonesia yang belum stabil sebab perjuangan masih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan beriringan dengan datangnya sekutu di Indonesia dan hadirnya berbagai pergolakan di berbagai daerah.

Tidak terlaksananya pemilu 1946, membuat pemerintah kemudian berusaha mewujudkan pemilu pertama yang dilaksanakan secara nasional. Semenjak 1950 ketika

Indonesia dibagi menjadi 10 daerah Provinsi yang otonom, telah terjadi jatuh bangun kabinet hampir setiap tahunnya. Hingga 1955 menjelang pemilu pertama telah terdapat 4 kabinet yang memerintah. Mulai dari Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953) serta Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 (Juli 1953-1955) (Aman, 2015). Setiap pergantian Kabinet menjanjikan akan melaksanakan pemilihan umum namun semuanya urung terlaksana.

Sebenarnya, sebelum pemilu pertama tahun 1955 beberapa daerah telah melaksanakan pemilu seperti Yogyakarta, namun sifatnya masih berskala lokal artinya pemilihan umum tersebut hanya berlangsung di suatu wilayah yang cukupannya tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia. Mengingat keinginan untuk melaksanakan pemilu telah ada sejak era kabinet Natsir, maka tidak mengherankan jika ada beberapa daerah yang melaksanakan pemilu lokal sebelum pemilu tahun 1955. Sebagai contoh kasus kita bisa melihat Yogyakarta yang melaksanakan pemilu tanggal 16 Juli 1951. Ini merupakan tonggak penting dalam pemerintahan Indonesia dalam membangun sistem demokrasi khususnya di Yogyakarta. Setidaknya Yogyakarta mampu meyakinkan Indonesia akan segera memiliki lembaga dewan yang demokratis dari hasil pemilu, sekaligus usaha menuju tata pemerintahan yang baik (Nugroho, 2018).

Tentunya wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan pemilu terutama dalam hal pendistribusian surat suara. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah mencoba untuk mengadakan lebih dahulu pemilihan umum pada level yang lebih rendah yakni kabupaten dan provinsi untuk mengukur kemampuan sumber daya dan kemampuan pengelolaannya.

Terlepas dari pemilu lokal yang terjadi di Yogyakarta, tentunya banyak persiapan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan pemilu pertama yang lingkungannya skala nasional di Indonesia. Perangkat Utama untuk melaksanakan Pemilu adalah adanya Undang-Undang Pemilu yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pelaksana pemilu yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Perumusan UU Pemilu ini telah digodok sejak era kabinet Wilopo yang menjabat sejak 3 April 1952, namun tentunya karena berbagai gangguan Pemilu di era Kabinet Wilopo tidak terlaksana (Maulida Hilmy Faihsal, 2018)

Karena pemilu yang dirancang merupakan skala nasional maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1953, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat hingga Irian Barat (ANRI, 2019). Dengan banyaknya daerah pemilihan ini maka dipandang perlu membentuk Lembaga Penyelenggara Pemilu, maka disusunlah kepanitiaan dalam pemilu 1955 yaitu: Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan yang dibentuk di setiap daerah, Panitia Pemilihan Kabupaten, serta PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dibentuk di setiap kecamatan (ANRI, 2019)

## **Terlaksananya Pemilu 1955**

Pemilu tahun 1955 dilakukan dalam dua tahap yaitu memilih anggota DPR pada 29 September dan 15 Desember untuk memilih anggota Konstituante (Irdaniah, 2022). Kontestan dari pemilu ini tidak hanya berasal dari partai politik, namun juga organisasi massa dan calon perorangan (orang yang tidak berpartai). Untuk pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai, 34 Organisasi Massa serta 48 calon perorangan. Mereka memperebutkan 260 kursi di DPR. Sedangkan pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa dan 29 calon perorangan. Mereka memperebutkan 520 kursi konstituante (ANRI, 2019).

Pada pemilihan anggota DPR tercatat 39 juta rakyat menyalurkan hak suaranya, sedangkan beberapa masyarakat tidak dapat menyalurkan hak suaranya seperti di Bali yang saat itu bertepatan dengan hari raya Galungan sehingga diminta untuk menjadwalkan ulang (ANRI, 2019). Setelah merampungkan pemungutan suara, PPI melangsungkan penghitungan suara. Hasilnya, PNI menjadi pemenang pemilu dengan suara sah 8.434.653 suara dengan persentasi 22,3 atas hasil tersebut PNI berhak atas 57 kursi di DPR. Kemudian Masyumi mengikuti di urutan kedua dengan 7.903.886 suara sah atau 20,9 persen dengan total kursi di DPR sama dengan yang diperoleh oleh PNI. Kemudian berururt-turut di urutan ketiga dan keempat, NU meraih 6.955.141 suara atau 18,4 persen sementara PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,4 persen dengan masing-masing partai tersebut memperoleh 45 dan 39 kursi di DPR (Maulida, 2019)

Berdasarkan naskah sumber arsip jejak demokrasi pemilu 1955, antusiasme masyarakat dilaporkan cukup tinggi dalam mengikuti pemilihan ini. Salah satunya digambarkan beberapa warga di kepulauan bersedia mengarungi lautan dengan menggunakan sampan untuk menuju ke TPS yang ada di pulau terdekat. Tak luput juga para kaum perempuan turut serta ambil bagian dalam pemilu kali ini (ANRI, 2019). Akan tetapi pemilu 1955 bukan tanpa hambatan, luasnya wilayah Indonesia menimbulkan berbagai hambatan selama proses persiapan pemilu ini. Hambatan tersebut terlihat pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Selatan sebagai satu provinsi yang merasakan dampak begitu besar dari DI/TII akibat adanya gangguan keamanan yang bahkan menyebabkan tidak sedikit masyarakat yang meninggalkan kampung halamannya (Said, 2019)

### **Gangguan DI/TII dalam Pemilu Sulawesi Selatan di Perbatasan Toraja dan Enrekang**

Gerakan DI/TII menjadi salah satu cerita yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan Pemilu 1955 di Sulawesi Selatan. Selain karena gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah yang terlama gerakannya, gerakan pimpinan Qahar Mudzakkar ini juga menjadi gerakan DI/TII terakhir yang ditumpas. Gerakan DI/TII tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jika pada pemilu 1955 ini terdapat tiga daerah berbahaya (Zona Merah) di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Aceh, serta Sulawesi Selatan. Pemberian label zona merah ini disebabkan karena dalam proses pelaksanaan pemilu 1955 terjadi pemberontakan DI/TII yang berpusat di tiga wilayah tersebut. Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dapil XII Sulawesi Selatan/Tenggara merupakan dapil terparah dan

sangat berbahaya. Banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah ini guna menggagalkan pemilu 1955 seperti menculik hingga membunuh anggota PPS (Anwar et al., 2021)

Namun, Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan pemilu 1955 meskipun mendapat gangguan dari pihak gerombolan DI/TII. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan daerah *Gemeente* Makassar dan *Afdeling* Pare-Pare yang melaksanakan pemungutan suara secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) (Irdaniah, 2022). Akan tetapi di beberapa daerah seperti *Afdeling* Bantaeng, Bone, Mandar hingga Luwu harus menunda pemilihan suaranya karena gangguan keamanan namun semuanya dapat terlaksana pada bulan November 1955. Mencekamnya wilayah pemilihan Sulawesi Selatan menarik perhatian Soekarno sebagai Presiden saat itu. Ia bahkan mengunjungi banyak tempat salah satunya adalah Toraja. Dalam pidatonya di Sulawesi Selatan, Soekarno meminta Qahar Mudzakkar untuk menyerah (Cicm, 2000)

Meskipun *Afdeling* Pare-Pare berhasil melaksanakan pemilu tepat waktu, karena daerah Sulawesi Selatan sangat luas dan beberapa daerah sudah terlanjur dikuasai oleh DI/TII maka ada beberapa daerah yang kemudian tidak melaksanakan pemilu tentunya daerah tersebut adalah daerah yang berada dibawah pengaruh DI/TII. Meskipun daerah-daerah itu biasanya berada di pedalaman namun masyarakat di pedalaman Sulawesi tidak bisa dikatakan sedikit apalagi masyarakat yang memang tinggal di pegunungan seperti Enrekang dan Toraja (Yusuf, 2018). Dua daerah yang kemudian wilayahnya cukup banyak dikuasai oleh DI/TII dan banyaknya pergolakan di daerah ini menjelang pemilu 1955.

Banyak sekali gangguan yang dilakukan oleh DI/TII di wilayah Sulawesi Selatan termasuk Enrekang dan Toraja yang jauh dari pusat *Afdeling* Pare-Pare sehingga sangat sulit bagi TNI untuk menjangkaunya. Apalagi setelah DI/TII menjadikan wilayah Baraka di Enrekang sebagai basis pertahannya (Aisyah et al., 2018). Meskipun begitu tidak semua daerah Enrekang dan Toraja tidak berpartisipasi dalam pemilu. Daerah yang berada di sekitar jalan poros dan Kota Enrekang sebagai pusat dari Kabupaten Enrekang masih bisa melaksanakan pemilu namun wilayah yang berada di pedalaman Enrekang dan Toraja terutama di perbatasan keduanya menjadi daerah yang sebagian masyarakatnya ikut pemilu sebagian juga tidak karena pengaruh DI/TII di daerah tersebut.

Daerah Benteng Alla merupakan perbatasan antara Enrekang dan Toraja yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Rano, Gandang Baru serta Buakayu yang merupakan wilayah Toraja. Benteng Alla sendiri merupakan wilayah yang dikuasai secara penuh oleh DI/TII sejak perluasan wilayah yang dilakukan oleh pasukan Qahar di tahun 1950an ketika mereka mulai memasuki hutan. Wilayah Benteng Alla kemudian menjadi wilayah yang dimanfaatkan oleh pasukan DI/TII karena wilayahnya yang jauh dari jalan poros dan berada di dataran tinggi yang memungkinkan pasukan DI/TII untuk mengamati situasi pada daerah sekitar yang posisinya lebih rendah (Rahman, 2020).

Gangguan terhadap pemilu yang dilakukan oleh DI/TII Semakin gencar menjelang berlangsungnya pemilu 1955. Setahun sebelumnya, tepatnya Januari 1954, Qahar Mudzakkar mengeluarkan surat larangan untuk memberikan suara pada pemilu, siapapun yang

berpartisipasi pada pemilu ini dicapnya sebagai orang kafir (Dijk, 1993). Karena itu Qahar dan pasukannya gencar melakukan gangguan terhadap persiapan pemilu ini. Daerah Enrekang yang berbatasan dengan Toraja yang kemudian dimaksud dalam tulisan ini adalah daerah Benteng Alla, wilayah ini kemudian menjelma menjadi wilayah kekuasaan DI/TII yang berbatasan dengan wilayah Toraja yang didominasi oleh TNI.

Daerah Toraja tepatnya di Distrik Buakayu, selama bulan Maret 1955, Pasukan DI/TII gencar melakukan pengacauan demi menggagalkan pemilu ini, tercatat lebih dari 500 orang gerombolan datang mengacau di sekitar Rano dan Buakayu menjelang pemilu (Kabubu Dewi Rusmala, 2017). Setahun sebelumnya tepatnya Bulan Agustus 1954 kondisi Rano dan Buakayu kembali dibuat tidak kondusif sebab lebih dari 200 orang gerombolan menyerang Rano (Pangalloan dan Sangorong) dan berhasil menduduki Rano kemudian menyerang ke POS Organisasi Pagar Desa (OPD) yang berada di seberang sungai Saddang yang kemudian menjadi batas pemisah wilayah Rano & Buakayu. Kontak senjatpun terjadi antara DI/TII yang berasal dari Benteng Alla dengan OPD yang dibantu oleh Divisi Brawijaya serta masyarakat setempat. Perang ini terjadi sejak jam 6 pagi dan berlangsung selama 10 jam serta menewaskan 3 orang dari OPD serta beberapa korban dari gerombolan yang tidak disebutkan jumlahnya (*Arsip Tana Toraja*, 1901). Meningkatnya pengacauan yang dilakukan oleh DI/TII menjelang pemilu ini membuktikan bahwa mereka benar-benar mencoba mengagalkan upaya pelaksanaan pemilu yang akan segera dilakukan di Toraja. Selain merusak alat-alat pemilu, mengancam masyarakat, gerombolan juga menculik dan membunuh petugas pemilihan umum. Keinginan mengagalkan pemilu sebagai tanda permusuhan terhadap Republik. Selain mencap mereka sebagai kafir, semua pemilih yang telah mendaftarkan diri pada pemilu akan didenda (Irdaniah, 2022).

Menguasai daerah pinggiran Enrekang sebenarnya merupakan salah satu upaya DI/TII untuk bisa mengagalkan pemilu di wilayah Toraja bagian barat sebab, daerah ini jauh dari jalan poros dan sulit dijangkau oleh TNI (S. Minta, 2018). Akibatnya DI/TII leluasa bergerak bahkan hingga ke Mamasa, sebab daerah perbatasan ini merupakan jalur bagi DI/TII untuk bisa sampai ke Mamasa (Allo, 2016). Sehingga gangguan-gangguan terhadap pemilu tidak hanya berhenti hingga ke perbatasan Enrekang-Toraja tetapi dapat menyebar hingga ke perbatasan Kabupaten lain sehingga tidak mengherankan jika masyarakat di Sulawesi Selatan tidak semuanya mampu memberikan suaranya pada pemilu 1955 ini.

Bergeser ke jalan poros Enrekang yang posisinya tidak jauh dari Toraja dilaporkan bahwa empat anggota tentara dan seorang anggota PPS gugur. Ketika gerombolan DI/TII menyekat sebuah mobil tentara dari Enrekang di jalan jurusan Kalosi pada tanggal 29 September. Para korban yang merupakan tentara berniat mengambil surat-surat suara yang ada dilokasi (Lutfiana Nur Rizky Winda, 2017). Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa gangguan yang dilakukan oleh DI/TII dapat bermacam-macam caranya selain membunuh anggota PPS, mencegat tentara untuk mengambil surat suara juga dilakukan oleh DI/TII. Posisi geografis Enrekang yang jalan porosnya dikelilingi oleh hutan dan bukit sangat menguntungkan bagi DI/TII untuk melakukan pengecatan di sepanjang jalan poros. Apalagi pada saat itu DI/TII gencar melakukan perusakan jembatan untuk menghambat lalu lintas pergerakan di jalan Poros Enrekang-Toraja (Abd.

Rahman Narra, 2018). Ini tentu bisa mengganggu proses pendistribusian surat suara ke daerah-daerah Enrekang saat itu.

Daerah-daerah yang dikuasai secara penuh oleh DI/TII tentunya tidak bisa memberikan suaranya akibat larangan pemilu oleh DI/TII. Tiga Swapraja yang dikuasai oleh DI/TII yakni Alla, Malua, Buntu Batu diprediksi tidak akan bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu pertama, namun nyatanya beberapa wilayah dari Swapraja Alla berpartisipasi dalam pemilu ini meskipun secara sembunyi-sembunyi terbukti dengan dibentuknya perlengkapan pemilihan di Swapraja Alla (*Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*, 1950a). Hal ini terjadi karena ada beberapa kepala kampung di Swapraja Alla tetap berdiri di belakang negara meskipun berada dibawah kekuasaan DI/TII. Cara sembunyi-sembunyi yang dimaksud ialah, masyarakat mendatangi rumah kepala kampung dengan tidak berkelompok melainkan sendiri-sendiri. Kemudian di dalam rumah kepala kampung masyarakat memberikan hak suaranya (*Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*, 1950b).

Tetapi kondisi ini tidaklah berlaku untuk semua wilayah Swapraja Alla. Seperti halnya Benteng Alla yang berada dibawah *Distrik* Baroko, Swapraja Alla. Di Benteng Alla tidak ada sama sekali tanda-tanda akan adanya pemilu. Tidak dibentuknya perlengkapan-perengkapan pemilu di daerah ini menandakan bahwa tidak akan ada aktivitas pemilu di tempat ini (S. Minta, 2018). Hal ini cukup beralasan sebab Benteng Alla berada dibawah kekuasaan penuh DI/TII dan masyarakat saat itupun, mengakui diri mereka sebagai masyarakat DI/TII. Karena itu mereka tunduk untuk tidak mengikuti dan melaksanakan pemilu sesuai surat larangan pemilu Qahar mudzakkar.

Sehingga ada beberapa daerah di Enrekang dan bahkan seluruh Sulawesi Selatan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu pertama ini. Terkhusus untuk seluruh daerah kekuasaan DI/TII, seperti halnya Benteng Alla serta seluruh *Distrik* Baroko, tidak ada suara mereka untuk negara Republik Indonesia saat itu. Sementara daerah yang berbatasan dengan Benteng Alla yaitu wilayah Toraja pada umumnya masih begitu banyak daerah ini yang bisa melaksanakan pemilu 1955, dibuktikan dengan adanya sejumlah partai di Toraja yang melakukan kampanye untuk menggalang dukungan. Akan tetapi, beberapa partai hanya memiliki sedikit pendukung, finansialnya juga boleh dikatakan kurang baik dan tidak terorganisir dengan baik di kawasan desa (Bigalke, 2016). Terlepas dari hal tersebut Parkindo sendiri keluar sebagai pemenang di daerah pemilihan Tana Toraja akibat keberhasilan partai ini menggalang dukungan sejak peristiwa 53 di Toraja (Bemmelen & Raben, 2011)

Gangguan yang dilakukan DI/TII terhadap Pemilu 1955 membuat wilayah pemilihan *Afdeling* Pare-Pare termasuk Enrekang di dalamnya hanya mencapai 72% suara dalam pemilu ini (*Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*, 1950). Tidak hanya itu, gencarnya gangguan DI/TII membuat PPI terpaksa melakukan perpanjangan waktu pemilihan di seluruh Indonesia terutama daerah yang mendapat pengaruh DI/TII. Pemilu yang dijadwalkan dapat terlaksana secara serentak pada 29 November 1955 akhirnya baru dapat dituntaskan pada 29 November 1955, lebih lama 2 bulan dari jadwal yang telah ditentukan oleh PPI. (Maulida Hilmy Faihsal, 2018). Tentunya pemerintah pusat telah mengupayakan penumpasan DI/TII di Sulawesi Selatan

terutama di Enrekang-Toraja dengan mengoptimalkan pasukan dari Divisi Brawijaya dan Diponegoro namun kedua divisi ini tidak mampu menguasai medan Enrekang yang berupa pegunungan sehingga pengejaran terhadap pasukan DI/TII sulit ditumpas oleh pemerintah pusat pada tahun 1955 ketika pemilu pertama berlangsung (Bigalke, 2016).

## **Kesimpulan**

Pemilu 1955 menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan namun sebenarnya beberapa daerah sebelumnya telah melakukan pemilihan lokal seperti Yogyakarta. Ini semua merupakan sebagian dari rangkaian persiapan dari pemilu yang telah lama direncanakan. Namun revolusi yang sebenarnya belum banyak selesai di daerah-daerah menyebabkan banyaknya perlawanan muncul yang bahkan menyebabkan tidak semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan pemilu 1955. Sulawesi Selatan bahkan digolongkan sebagai zona merah karena pergolakan DI/TII. DI/TII yang menguasai daerah-daerah pinggiran terutama di Enrekang menyebabkan wilayah ini sebagian besar penduduknya ada yang mengikuti pemilu ada juga yang tidak bisa mengikutinya.

Bagi daerah yang berada dibawah pengaruh TNI masyarakatnya tetap bisa melaksanakan pemilu yang dibuktikan dengan terbentuknya perlengkapan pemilu di daerah tersebut, namun daerah-daerah itu mengalami gangguan yang cukup hebat dari DI/TII seperti daerah-daerah Toraja yang berbatasan dengan Enrekang. Sementara itu bagi daerah yang berada dibawah pengaruh DI/TII, masyarakatnya sebagian besar tidak bisa melaksanakan pemilu karena Qahar Mudzakar sendiri telah mengeluarkan surat peringatan tahun 1954 bahwa siapapun yang mengikuti pemilu akan dianggap kafir dan akan dibunuh sehingga masyarakat dibawah pengaruh DI/TII tidak bisa melaksanakan pemilu. Namun, meskipun berada dibawah pengaruh DI/TII, masyarakat yang wilayahnya dekat dengan kota atau daerah kekuasaan TNI bisa melaksanakan pemilu.

Meskipun daerahnya berstatus sebagai daerah DI/TII. Tetapi pemilu itu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dengan dikordinator oleh kepala kampung, yaitu dengan mendatangi rumah kepala kampung secara bergantian untuk menghindari kecurigaan pasukan DI/TII. Ini merupakan situasi unik yang selama ini tidak tergambar dalam kesuksesan pemilu 1955 sebagai pemilu pertama yang terselenggara secara nasional. Masyarakat mampu melaksanakan pemilu dengan caranya sendiri meskipun dalam keadaan yang serba sulit karena berusaha menghindari larangan pemilu dari DI/TII. Contoh kasus di perbatasan Enrekang-Toraja ini diharapkan menjadi rujukan untuk penulisan sejarah DI/TII kedepannya terutama yang berkaitan dengan segala aktivitas DI/TII. Tentunya kasus di perbatasan Enrekang-Toraja ini menunjukkan bahwa adanya keinginan yang besar dari masyarakat untuk melaksanakan pemilu di daerahnya meskipun berada dalam kondisi tidak stabil akibat gangguan DI/TII.

DI/TII memang melakukan banyak gangguan, namun yang selama ini luput dari sorotan ialah bagaimana situasi bagi daerah-daerah yang berada dibawah pengaruh DI/TII. Artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran akan hal tersebut. Kedepan penulis menyarankan agar tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemilu yang dikaitkan dengan DI/TII semakin banyak dan beragam. Mengingat pemilu itu menjadi sarana penyaluran suara massal apalagi

dalam waktu dekat Indonesia akan kembali melaksanakan pemilu di tahun 2024. Tentunya gangguan dalam bentuk lain bisa saja ada dalam pemilu tersebut nantinya. Dengan berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan berbagai gangguanya diharapkan kita semua dapat belajar untuk menyikapi dan mencari jalan terbaiknya. Apalagi situasi buruk pada pemilu 1955 telah kita lewati.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Begitu juga penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang penulis temui di pelosok Enrekang dan Toraja serta bersedia untuk diwawancarai dengan memberikan informasi-informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini sebab penulis sadar data-data arsip tentang daerah yang pernah menjadi wilayah kekuasaan DI/TII arsipnya sulit dijumpai karena tidak adanya pengarsipan di daerah ini. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada dosen-dosen di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang memberikan banyak masukan kepada penulis dalam mengkaji DI/TII melalui beberapa mata kuliah. Juga penulis berikan terima kasih yang mendalam kepada Alm. Yusuf yang dengan setia menemani penulis untuk berkeliling mencari informan untuk keperluan penulisan ini, beliau sangat membantu penulis dalam merangkai kepingan-kepingan DI/TII di daerah perbatasan Enrekang-Toraja ini.

### **Daftar Rujukan**

- Abd. Rahman Narra. (2018). *DI/TII di Benteng Alla*. Hasil Wawancara Pribadi
- Aisyah, N., Patahuddin & Rasyid, R. (2018). Baraka: Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pattingalloang*, 5(2), 49–60.
- Allo, A. (2016). *Sejarah Perjuangan Rakyat Mamasa Melawan Gerombolan DI/TII dan Pasukan Bn. 710 (1950-1965)*. Gereja Toraja Mamasa.
- Aman. (2015). *Sejarah Indonesia masa kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Ombak.
- ANRI. (2019). *Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jakarta: ANRI
- Anwar, I., Mappangara, S. & Makkelo, I. (2021). Kegagalan Partai Komunis Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara. *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 239–252.  
<https://doi.org/10.36869/pjhpish.v7i2.208>.
- Arsip Nasional RI Wilayah Makassar. *Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*. (1950-1960). Reg 325
- Arsip Nasional RI Wilayah Makassar. *Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*. (1950-1960). Reg 238
- Arsip Nasional RI Wilayah Makassar. *Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi*. (1950-1960). Reg 240
- Arsip Nasional RI Wilayah Makassar. *Arsip Tana Toraja*. (1901-1959). Reg 932.

- Bemmelen, V. S. & Raben, R. (2011). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an: Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bigalke, T. W. (2016). *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak.
- Cicm, S. V. G. (2000). *Gereja Katolik di Tana Toraja dan Luwu*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Dijk, C. Van. (1993). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta; Pustaka Umum Grafiti.
- Faihsal, M. H.. (2018). *Perwakilan Politik dan Gejolak Politik Pasca Pemilu Pertama 1955-1960*. Tesis. Depok. Universitas Indonesia.
- Irdaniah. (2022). *Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Afdeling Pare-Pare*. Tesis. Makassar. Universitas Negeri Makassar.
- Kabubu Dewi Rusmala. (2017). *Gerakan DI/TII Qahar Mudzakkar di Tana Toraja, 1953-1965*". Tesis. Depok. Universitas Indonesia.
- Lutfiana Nur Rizky Winda. (2017). Usaha-Usaha Penggagalan Pemilu Pertama Tahun 1955. *Jurnal Avatara*, 5(1), 67–80.
- Maulida, F. H. (2019). *Sejarah Pemilu Yang Dihilangkan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Nugroho, U. (2018). *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*. Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pendeta Daud Sangka. (2018). *DI/TII di Benteng Alla*. Hasil Wawancara Pribadi
- Rahman, A. (2020). Benteng Alla: Islamization of the Ancestral Land by Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. *Jurnal Ihis*, 4(1), 45–52.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta. Serambi.
- S. Minta. (2018). *DI/TII di Benteng Alla*. Hasil Wawancara Pribadi
- Said, M. (2019). *Migrasi Orang Enrekang ke Pare-Pare 1950-1965*. Pare-Pare. Sampan Institute.
- Yusuf. (2018). *DI/TII di Benteng Alla*. Hasil Wawancara Pribadi